

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Koperasi

Koperasi pertama kali muncul pada awal abad ke 19. Pada masa itu terutama di negara-negara Eropa yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, kaum buruh berada pada puncak penderitaannya<sup>1</sup>. Perlu kita ketahui bahwa persoalan yang dihadapi oleh manusia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Pada era sistem kapitalisme inilah, inspirasi koperasi beserta gerakannya dilahirkan dan merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya kaum buruh, untuk memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya dan yang dalam perkembangannya kemudian menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 6.

<sup>2</sup>Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*, 18.

G. Mladenata, di dalam bukunya "*Histoire Desdactrines Cooperative*" mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

H.E. Erdman, dalam bukunya "*passing Monopoly as an aim of cooperative*" bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.<sup>3</sup>

## **B. Tujuan dan Prinsip – Prinsip Koperasi**

Tujuan Koperasi dapat ditemukan pada pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: "koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945."

Prinsip-prinsip koperasi bermula dari peraturan umum pengelola koperasi yang dikembangkan oleh pelopor-pelopor koperasi di Rochdale, yang dikenal dengan "prinsip-prinsip Rochdale". Rumusan prinsip-prinsip koperasi di Rochdale ialah hasil dari proses pemikiran yang matang oleh kepahitan zaman,

---

<sup>3</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*, 19.

dan teruji oleh kenyataan sejarah, yang didorong oleh semangat yang tinggi untuk mengangkat martabat manusia.<sup>4</sup>

Sedangkan prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan koperasi secara Internasional. Dalam mempelajari prinsip koperasi Internasional, disadari bahwa penyusunan prinsip koperasi Indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut.

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal;
- e. Kemandirian.<sup>5</sup>

### **C. Perkembangan Koperasi**

Pada permulaannya kita mengenal 3 jenis bentuk koperasi yang didasarkan pada bidang-bidang usahanya, yaitu Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi, dan Koperasi Kredit. Selanjutnya terjadi perkembangan usaha yang juga memerlukan perkembangan struktur organisasi, sehingga penjenisan koperasi

---

<sup>4</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*, 22.

<sup>5</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*, 25.

seperti di atas terasa kurang tepat dan perlu dikembangkan pula. Perkembangan usaha koperasi berlangsung serba cepat dan luas mengikuti kemajuan ekonomi dan kepentingan/kebutuhan para anggotanya.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan perkembangan-perkembangan tersebut maka untuk mengusahakan pengelompokan yang lebih jelas tentang fungsi-fungsi koperasi menurut jenis dan berbagai bidang usahanya orang-orang banyak tertarik untuk membagi koperasi sebagai berikut.

- a. Berdasarkan fungsi-fungsi usaha/kegiatan ekonominya :  
koperasi dapat dibagi menjadi :
  - 1) Koperasi Konsumsi,
  - 2) Koperasi Produksi,
  - 3) Koperasi Kredit,
  - 4) Koperasi Jasa (Koperasi Angkutan, Pemangkas, dan lain-lain).
- b. Berdasarkan kelompok orang-orang yang secara homogen mempunyai kelompok yang sama, antara lain :
  - 1) Koperasi Pegawai Negeri,
  - 2) Koperasi ABRI, PEPABRI,
  - 3) Koperasi Nelayan,
  - 4) Koperasi Petani,
  - 5) Koperasi Pelajar, Mahasiswa,
  - 6) Koperasi Pesantren,

---

<sup>6</sup> G. Kartasapoetra, dkk., *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2013), 1.

- 7) Koperasi Pramuka, dan lain-lain.
- c. Berdasarkan jenis barang yang diolah atau dijadikan objek kegiatan :
- 1) Koperasi Kopra,
  - 2) Koperasi Batik,
  - 3) Koperasi Garam Rakyat,
  - 4) Koperasi Tembakau,
  - 5) Koperasi Perikanan, Peternakan,
  - 6) Koperasi Angkutan Taksi,
  - 7) Koperasi Pengelolaan Hasil Hutan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

#### **D. Perkembangan Usaha Koperasi Menciptakan Lapangan Kerja Baru**

Berbagai bidang usaha koperasi sesungguhnya telah menciptakan lapangan kerja baru atau membuka lapangan kerja baru baik bagi para anggota dan keluarganya atau anggota masyarakat umumnya.<sup>8</sup> Dan hal ini pun terlihat pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat yang dimana anggotanya kebanyakan berasal dari warga setempat.

#### **E. Klasifikasi Tenaga Kerja**

Pada hakikatnya tenaga kerja dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

---

<sup>7</sup> G. Kartasapoetra, dkk., *Praktek Pengelolaan Koperasi*, 2.

<sup>8</sup> G. Kartasapoetra, dkk., *Praktek Pengelolaan Koperasi*, 7.

1. Tenaga Kerja Terlatih.

Bagi tenaga kerja terlatih biasanya bentuk pekerjaan yang ditekuni tidak terlalu membutuhkan “kecakapan teoritis”. Bagi mereka yang berkecimpung dalam pekerjaan ini yang paling dibutuhkan adalah peraktek dengan masa latihan hingga memperoleh kecakapan pada tingkat “terampil”

2. Tenaga Kerja Terdidik.

Untuk tenaga kerja terdidik, mereka yang memperoleh pendidikan teoritis sampai taraf dan bidang/disiplin tertentu. Golongan tenaga kerja terdidik ini dapat dibedakan ke dalam 2 macam yaitu:

- a. Tenaga kerja terdidik berpengalaman.
- b. Tenaga kerja terdidik tanpa/belum berpengalaman.

3. Tenaga Kerja Tak Terdidik,

Tenaga kerja tak terdidik ini termasuk para pekerja yang tidak memperoleh kecakapan teoritis, sehingga yang utama bagi mereka ini adalah “kerja praktis”<sup>9</sup>

## **F. Definisi dan Pengertian Pengangguran**

Definisi pengangguran tidak identik dengan tidak (mau) bekerja. Seseorang baru dikatakan menganggur bila dia ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya. Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia

---

<sup>9</sup> Sudarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 112.

angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang mencari kereja, sedangkan yang tidak mencari kerja, entah karena harus mengurus keluarga atau sekolah, tidak masuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapat pekerjaan.

Seorang dikategorikan bekerja apabila ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan mendapatkan upah. Setelah menempatkan semua orang dewasa yang diperoleh berdasarkan hasil survei, BLS ( Bureau of Labor Statistik = Biro Statistika Tenaga Kerja ) menghitung berbagai nilai statistika untuk menyimpulkan kondisi pasar tenaga kerja. BLS mendefinisikan Angkatan Kerja sebagai jumlah populasi yang bekerja dan yang tidak bekerja:

Angkatan Kerja = Jumlah yang bekerja + jumlah yang tidak bekerja

BLS mendefinisikan Tingkat pengangguran sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Yang Tidak Bekerja}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100$$

BLS menghitung tingkat pengangguran tidak hanya untuk seluruh populasi orang dewasa tetapi juga untuk kelompok –

kelompok yang terdefinisi lebih sempit, kulit hitam, kulit putih, perempuan, laki-laki.<sup>10</sup>

### G. Masalah Pengangguran

Jumlah pengangguran terus bertambah dari sekitar 4,5 juta orang atau 5% pada 1997 (menjelang krisis ekonomi), menjadi sekitar 6,5 juta orang atau 7% pada tahun 2000, dan menjadi 9,5 juta orang atau 9,5% pada tahun 2003. Indikator makro ekonomi dalam tiga tahun terakhir ini memang berangsur-angsur baik dalam bentuk laju inflasi dan tingkat bunga yang relatif rendah. Namun indikator makro tersebut belum mampu mendongkrak sektor riil. Penyebab utama masalah berat tersebut adalah pengambil kebijakan sejak pemerintah Orde Baru hingga sekarang ini yang terlalu percaya pada Trickle-down effect. Mereka beranggapan, dengan mendorong pertumbuhan mereka tidak menyadari struktur perekonomian yang dominan sektor informal, hambatan-hambatan birokrasi dan kekakuan pasar. Misalnya, walaupun tingkat bunga pada skala makro di bawah 10%, namun hampir tidak ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengenakan bunga pinjaman di bawah 25%. Demikian juga para keluarga petani dan keluarga miskin, tetapi sangat sulit memperoleh kredit karena mereka pada umumnya tidak paham memberikan agunan dan mengisi formulir perjanjian meminjam uang.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> N. Gregory Mankiw, *Principles Of Economics Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 133.

<sup>11</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 382.



## H. Cara menangani Pengangguran

Pemerintah baru, terutama selama 100 hari pertama kerja kabinet, perlu memprioritaskan penanggulangan pengangguran dan setengah pengangguran, yaitu antara lain dengan:

1. Mengembangkan usaha mandiri dan usaha kecil, termasuk usaha-usaha keluarga dan kerajinan rakyat. Usaha-usaha menengah dan besar sudah dapat dipersilahkan memanfaatkan kemudahan indikator makro yang sudah relatif baik.
2. Untuk mendorong pengembangan usaha mandiri, usaha kecil dan usaha keluarga, perlu menyalurkan dana melalui bank seperti BPR dengan tingkat bunga dibawah 15% per tahun.
3. Untuk membantu usaha keluarga miskin, perlu menyediakan dana pinjaman dengan tingkat bunga cukup menutupi biaya administrasi bank, misalnya 7%, yang diperoleh tanpa agunan.
4. Bantuan kepada keluarga miskin seperti beras untuk si miskin (raskin) sedapat mungkin diganti menjadi pencintaan kesempatan kerja.
5. Sejumlah dana bergulir disediakan dan disalurkan untuk usaha-usaha keluarga disektor informal sehingga dapat menambah penghasilan mereka.
6. Mulai tahun ke dua, dikembangkan program latihan kewirausahaan terutama bagi para lulusan SLTP dan SLTA

yang tidak melanjutkan sekolah, sehingga mampu bekerja sendiri.<sup>12</sup>

## **I. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam skripsi Nurul Eka Mayasari, 2009 “Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Di Kabupaten Bora)” Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Populasi penelitian ini adalah seluruh KPRI di Kabupaten Bora yang berjumlah 62 KPRI dan diambil sampel 40 KPRI dengan teknik purposive sampling. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan, motivasi, dan pemahaman pengurus mengenai pengukuran kinerja koperasi, pengukuran kinerja sesuai dengan Pedoman Peningkatan Koperasi. Data diambil dengan metode angket dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara distribusi persentase.

Hasil analisis data menunjukkan data bahwa para pengurus KPRI masih menggunakan ukuran rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dalam mengukur kinerja yaitu sebanyak 40,4% disebabkan kurangnya pengetahuan pengurus KPRI, 33,7% kurangnya pendidikan dan motivasi serta 41,3% kurangnya pemahaman terhadap pengukuran kinerja koperasi. Jika diukur dengan Pedoman Peningkatan Koperasi, KPRI di Kabupaten

---

<sup>12</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 383.

Blora dalam kriteria berkualitas dengan rata-rata nilai 353. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Dinas Koperasi tidak pernah melakukan sosialisasi pengukuran kinerja dan tidak pernah memberikan pelatihan mengenai pengukuran kinerja secara efektif, masih ada beberapa komponen pada penilaian klasifikasi berdasarkan Kep. Men. No. 06/Per/M. KUKM/III/2008 kurang tepat digunakan.<sup>13</sup>

Adapun skripsi yang lainnya yang bernama Agustina Mustika Cd, 2010 “Analisis tingkat pengangguran dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di kota semarang” Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.

Di kota Semarang angka pengangguran yang terjadi tergolong tinggi selama periode waktu 1991 hingga tahun 2008 dengan tingkat pengangguran rata-rata per tahun sebesar 16,37 persen. Angka pengangguran yang tinggi ini merupakan suatu fenomena ekonomi yang terjadi di kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Semarang.

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda didapatkan hasil bahwa variabel upah berhubungan negatif dan signifikan sebesar -0,000019, inflasi berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran sebesar 0,088789, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan sebesar -0,426937,

---

<sup>13</sup> Nurul Eka Mayasari, *Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Di Kabupaten Blora*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009)

tingkat kesempatan kerja berhubungan negatif dan signifikan sebesar 0,220765. Sedangkan variabel beban tanggungan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini diduga karena adanya penduduk usia non-produktif yang masih ikut bekerja sehingga tidak mempengaruhi tingkat pengangguran.

Dalam skripsi Arief Triwibowo, 2016 “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Pada Pergudangan Semen Di kota Bandar Lampung” Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sistem pengupahan buruh bongkar muat pada pergudangan semen di Kota Bandar Lampung mengalami kesalahan sistem pengupahan dikarenakan pertentangan sumber hukum perburuhan. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/627/III.05/HK/2015 Tentang Penetapan Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sektor Sortasi, Pergudangan dan Pertokoan serta Pasar di Provinsi Lampung 2016, sebagai peraturan sistem pengupahan buruh bongkar muat. Dalam SK tersebut sistem pengupahan menggunakan sistem upah satuan unit (per zak semen). Padahal,

realitanya kebiasaan sistem pengupahan yang terjadi di dalam buruh bongkar muat menggunakan sistem upah borongan. Perlindungan Buruh Bongkar Muat Pada Pergudangan Semen di Kota Bandar Lampung tidak di - cover oleh UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sehingga selalu terjadi konflik mengenai kepentingan hak, dalam hal ini upah yang selalu tidak sesuai.

Adapun perbedaan pada skripsi pertama ialah Variabel yang diteliti adalah pengetahuan, motivasi, dan pemahaman pengurus mengenai pengukuran kinerja koperasi, pengukuran kinerja sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Data diambil dengan metode angket dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara distribusi persentase. Judul yang ke dua metode yang digunakan hanya perhitungan analisis regresi berganda. Dan pada skripsi yang ketiga Variabel X = Pengupahan Buruh Bongkar Muat, dan Variabel Y = Pergudangan Semen Di kota Bandar Lampung, Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Sedangkan skripsi yang penulis buat Variabel X = Peran Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, dan Variabel Y = Tingkat Penangguran Masyarakat. Menggunakan uji validitas, reabilitas, regresi sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t (Hipotesis).

## J. Hipotesis

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.<sup>14</sup> Dikatakan sementara karena jawaban yang diberi baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Dalam menguji hipotesis ini penulis mengumpulkan data- data empiris agar dapat menerima atau menolaknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa: H<sub>0</sub> (hipotesis nol) yang memprediksi bahwa *independent variable (treatment)* atau variable bebas tidak mempunyai efek pada *dependent variable* atau variable terikat dalam populasi. H<sub>0</sub> juga memprediksi tidak adanya perbedaan antara suatu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Sedangkan H<sub>1</sub> (hipotesis alternatif) yang memprediksi bahwa *independent variable (treatment)* atau variable bebas mempunyai efek pada *dependent variable* dalam populasi. H<sub>1</sub> juga mempredik adanya perbedaan antara suatu kondisi dengan kondisi yang lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 64.

<sup>15</sup> Agus Irianto, *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2009), 97.